

KIA9\_ASP\_002

## DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN REMBANG

Yulia Trisnawati<sup>1)</sup>, Siti Hartinah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta  
email: yuliatrisnawati70@gmail.com

<sup>2)</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta  
email: siti.hartinah21@gmail.com

### Abstract

*This study aims to examine the effect of clarity of budget targets, accounting controls and reporting systems to the accountability performance of the National Land Agency (BPN) of Rembang Regency. This research method uses quantitative methods. The population in this study were employees at the office of the National Land Agency (BPN) of Rembang Regency who met the criteria. The data collection method in this survey requires a questionnaires and primary data by distributing questionnaires directly. The sampling process was carried out using a non-probability sampling method and this study used the Slovin formula with the results of data from 76 respondents. The analytical method used is the analysis of Structural Equation Modelling (SEM). The data in this study were processed using Software Smart Partial Least Square (SmartPLS) version 3. Hypothesis testing with the t test basically shows how far the influence of one independent variable individually in explaining the dependent variable. The f statistic test aims to determine the existence of a significant influence together between the independent variables on the dependent variable. The results of this study reveal that all the independent variables in this study, namely effect of budget targets, accounting controls and reporting systems have a positive and significant impact of clarity of budget targets, accounting controls and reporting systems to the accountability performance of the National Land Agency (BPN) of Rembang Regency.*

**Keywords:** Clarity of budget targets, accounting control, reporting system, accountability performance.

### PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berlaku untuk bidang administrasi pemerintahan, sehingga undang-undang final berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 harus melaksanakan tanggung jawab lembaga pemerintah dalam berkewajiban untuk kesuksesan dan kegagalan penerapan misi organisasi agar tujuan dan sasaran dapat dicapai, yang dibangun dengan pertanggungjawaban secara berkala. Konsep pertanggungjawaban ini telah memandu sebagian besar reformasi sektor publik dan telah memaksa pemangku kepentingan untuk mengambil kepemilikan dan memastikan berfungsinya layanan publik dengan baik (Mikoshi, 2020). Akibatnya, pemerintah mengembangkan aturan pelaksanaan sistem akuntabilitas yang efektif dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perspektif akuntabilitas adalah dasar *good governance* dalam organisasi publik. Pembentukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terdapat pada pegawai yang berkewajiban dalam melaksanakan berbagai manfaat administrasi di setiap institusi dan seterusnya menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerjanya. Pengelolaan akuntabilitas pemerintah tidak dapat dipisahkan dari penganggaran. Dalam pengelolaan

administrasi, anggaran sangat menentukan untuk semua aktivitas dengan satuan uang (Rininda & Sudaryati, 2020).

Akuntabilitas kinerja dapat dipengaruhi oleh Anggaran. Anggaran memainkan peran penting baik dalam organisasi pemerintah maupun swasta. Menganggarkan rencana organisasi merupakan pekerjaan yang cukup berat dan menyusahkan. Tetapi, itu paling utama dalam suatu organisasi. Ini adalah bentuk dalam menyusun dan membuktikan bahwa organisasi mendistribusikan sumber daya dengan benar (Pangkey & Pinatik, 2015). Ketika mengelola perusahaan, manajemen pada awalnya menentukan strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran kemudian membentuk rencana kegiatan. Rencana yang dibuat disajikan melalui bentuk anggaran. Dalam anggaran yang direncanakan secara periodik terdapat kegiatan dalam satuan mata uang, barang, dan jasa yang merupakan alat pengawasan organisasi. Hal ini dibuktikan bahwa anggaran bisa dipakai sebagai alat untuk mengendalikan perusahaan atas perhitungan penyusunan keuangan (Eni Kaharti, 2019). Oleh karena itu, dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang dikelompokkan secara terperinci dalam setiap laporan didalam pelaksanaan kegiatan operasional di instansi tersebut, hal ini berdampak pada tepatnya target anggaran yang dilaksanakan pada setiap kegiatan. Kejelasan sasaran anggaran juga dapat dilihat berdasarkan tingkat realisasi capaian kinerja di dalam instansi pada setiap periode yang disajikan pada laporan transaksi keuangan. Anggaran yang tidak efisien dan tidak berbasis kinerja bisa menghambat rencana yang dibuat. Maka dari itu, penting dan tepat untuk menetapkan target anggaran yang jelas di kalangan pemerintah. Hal ini disebabkan karena mempengaruhi sistem akuntabilitas pemerintah dan berkaitan dengan berfungsinya pemerintah dalam perekonomian, terutama dalam penyediaan pelayanan kepada publik (Ali Zakiyudin & Suyanto, 2015). Penelitian yang membuktikan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja terdiri dari penelitian yang dilaksanakan oleh (Fathia, 2017). Namun demikian terdapat ketidakkonsistensinan dalam hasil penelitian oleh (Pratama et al., 2019), (Mikoshi, 2020), dan (Aprilianti et al., 2020) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai hubungan negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Selain itu, akuntabilitas kinerja dapat dipengaruhi oleh pengendalian Akuntansi (Budiani & Asyik, 2021). Ali Zakiyudin & Suyanto (2015) mengungkapkan bahwa pengendalian akuntansi merupakan langkah pemeriksaan untuk pengendalian yang terkait dalam pekerjaan atau transaksi akuntansi. Pengendalian akuntansi dipakai dalam memeriksa sistem perancangan, pencatatan, dan tata cara pemantauan berdasarkan sistem informasi (Budiani & Asyik, 2021). Penerapan sistem pengendalian akuntansi mengharuskan manajer untuk melaksanakan keputusan yang baik, mengendalikan operasi secara efisien, berhasil memperkirakan dana dan daya laba tertentu, dan menerima pilihan terbaik di setiap situasi dan kondisi untuk diperbaiki. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa Pengendalian Akuntansi berdampak positif terhadap Akuntabilitas Kinerja meliputi penelitian dari (Prezelina & Wuryani, 2019), (Cahyani & Utama, 2015), dan (Isnanto et al., 2020). Namun demikian terdapat ketidakkonsistensinan dalam hasil penelitian dari (Setyawan, 2017) membuktikan bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Tidak hanya pengendalian akuntansi saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja, terdapat sistem pelaporan keuangan yang berperan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Sistem pelaporan yang efektif dan efisien sangat penting untuk melacak serta memantau kinerja pengelola anggaran. Pemerintah bertanggung jawab untuk menginformasikan laporan keuangan dan lainnya yang dapat dipakai pemangku kepentingan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sebagai organisasi publik, pemerintah harus menginformasikan laporan keuangan yang benar, sesuai, dan bisa diandalkan. Semakin cepat dan tepat informasi yang dialokasikan dapat berdampak positif bagi instansi pemerintah (Budiani & Asyik, 2021). Penelitian yang menjelaskan bahwa variabel Sistem Pelaporan

berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja meliputi penelitian (Paramitha & Gayatri, 2016), (Yulianto & Muthaher, 2019), dan (Irawati & Agesta, 2019). Namun demikian terdapat ketidakkonsistensian dalam hasil penelitian dari (Precelina & Wuryani, 2019) dan (Rininda & Sudaryati, 2020) yang membuktikan bahwa Sistem Pelaporan berdampak negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Pemenuhan akuntabilitas kinerja tidak hanya terjadi pada sektor swasta namun juga sektor pemerintah. BPN sebagai salah satu satuan unit kerja pemerintah yang mengalami berbagai permasalahan berkaitan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Hal ini seperti terjadi pada BPK Jateng menyerahkan LHP-LKPD 30 Daerah – Semarang. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah menyampaikan ulang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 (TA) untuk empat wilayah. Penyerahan LHP LKPD TA 2019 dilaksanakan dengan cara virtual dalam konferensi video oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jawa Tengah dan pimpinan DPRD serta pimpinan daerah. Penyerahan LHP- LKPD ke empat wilayah tersebut di masa wabah covid 19 dan penetapan kerja jarak jauh (WFH), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan LHP atas LKPD TA 2019 untuk 30 pemerintah daerah (pemda) di Jawa Tengah, aktivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh BPK di Jawa Tengah telah melakukan berbagai penyerasian. Pemeriksaan BPK selalu dilakukan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan memperhatikan pengendalian mutu dan jaminan mutu yang selektif. Dimulai dari ketua tim, pengendali teknis, penanggung jawab sampai kepala perwakilan. Penyampaian LHP atas LKPD di 30 wilayah Jawa Tengah tahun anggaran 2019 dilakukan mulai April 2020 hingga Mei 2020 dan terbagi dalam beberapa tahap. Dari 30 LKPD pada tahun anggaran 2019, semuanya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). [Republika.co.id](http://Republika.co.id), (Kamis 21 Mei 2020 13:45 WIB).

Salah satu BPN yang memiliki kendala akuntabilitas publik yaitu BPN pada kabupaten Rembang. Berbagai permasalahan pertanahan muncul perlu ditangani oleh BPN Kabupaten Rembang bertanggung jawab atas hal tersebut. Secara khusus, pelayanan sertifikat tanah di BPN Kabupaten Rembang dinilai kurang optimal, prosedur administrasi terkesan lambat, berbelit-belit, mahal dan memakan waktu. Permasalahan yang dihadapi BPN Kabupaten Rembang terkait dengan keterbatasan tenaga kerja dan terkadang kandidat yang memproses permintaan sertifikat tidak dapat mengisi beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi sertifikat tanah. Hal ini juga memperlambat proses pendaftaran hak atas tanah. Agar tidak mendapat perhatian lebih pada masa reformasi ini, kualitas pelayanan di BPN Kabupaten Rembang harus segera ditingkatkan. Fenomena yang terjadi pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang yaitu adanya system eror pada saat perbaikan dan pembaruan sistem aplikasi keuangan. Sistem aplikasi akuntansi keuangan tidak dapat dipisahkan dari penganggaran dan pelaporan keuangan. Tanpa dukungan sistem aplikasi akuntansi keuangan yang memadai, penganggaran dan pelaporan keuangan yang konsisten dan akurat tidak akan tercapai. Saat ini, pencatatan pelaporan dalam sistem aplikasi akuntansi keuangan telah didukung oleh beberapa aplikasi. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis berinisiatif untuk mempelajari mengenai determinan akuntabilitas kinerja pada KPP Pratama Pesanggrahan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan keuangan. Sehingga hal ini dapat diperbaiki dengan segera.

## STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Halim dan Abdullah (2006), teori keagenan merupakan kesepakatan persetujuan antara dua pihak atau lebih, pihak pertama disebut prinsipal dan pihak lainnya sebagai agen (Widia & Verawaty,

2017). Anthony dan Govinfracan (2005) mengungkapkan bahwa teori keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen, di mana satu atau lebih prinsipal mendelegasikan kekuasaan kepada orang lain (agen) demi kesejahteraan bersama.

### **Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)**

Teori kelembagaan atau *institutional theory* yang didasarkan pada pembentukan organisasi akibat tekanan lingkungan institusional, yang akan mengarah pada institusionalisasi (Nadila et al., 2021). Berbagai penelitian tentang organisasi sektor publik memakai teori institusional menjadi kriteria untuk menunjukkan struktur organisasi dan perubahannya. Pandangan teori institusional menjelaskan struktur organisasi di mana suatu organisasi mengadopsi norma-norma budaya dan etika, yang selanjutnya menuju pada legitimasi dengan bantuan organisasi eksternal (DiMaggio dan Powell, 1983). Menurut teori ini, suatu organisasi menjurus berjalan ke arah homogenisasi, walaupun mereka dari awal memperlihatkan keanekaragaman yang cukup besar (DiMaggio dan Powell, 1983). Sebutan lain yang relevan untuk mendeskripsikan konsep homogenisasi adalah *isomorfisma* (Ahyaruddin & Akbar, 2017).

### **Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas merupakan isu penting yang menjadi perhatian publik. Akuntabilitas artinya penyelenggara pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada masyarakat. Dalam kondisi saat ini, kinerja sebagai hasil kerja menjadi prioritas dalam proses administrasi pemerintahan. Rogers (1994) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari pekerjaan itu sendiri, karena pekerjaan itu berkaitan erat dengan tujuan strategis organisasi, keputusan pelanggan, dan distribusi ekonomi. Pemaksaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin cepat terhadap pelaksanaan *good governance* tidak hanya dipengaruhi oleh pengaruh globalisasi tetapi juga peningkatan pengetahuan masyarakat.

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kejelasan sasaran anggaran seberapa jauh tujuan anggaran didefinisikan dengan eksplisit dan terstruktur, serta tujuannya adalah membuat orang yang bertanggung jawab dapat memahami anggaran dalam mencapai tujuan anggaran (Isnanto et al., 2020). Tanggung jawab manajemen keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari anggaran pemerintah daerah. Tujuan anggaran yang jelas melancarkan dalam menghitung kesuksesan atau kegagalan implementasi kebijakan organisasi dengan memperoleh tujuan dan sasaran yang ditentukan

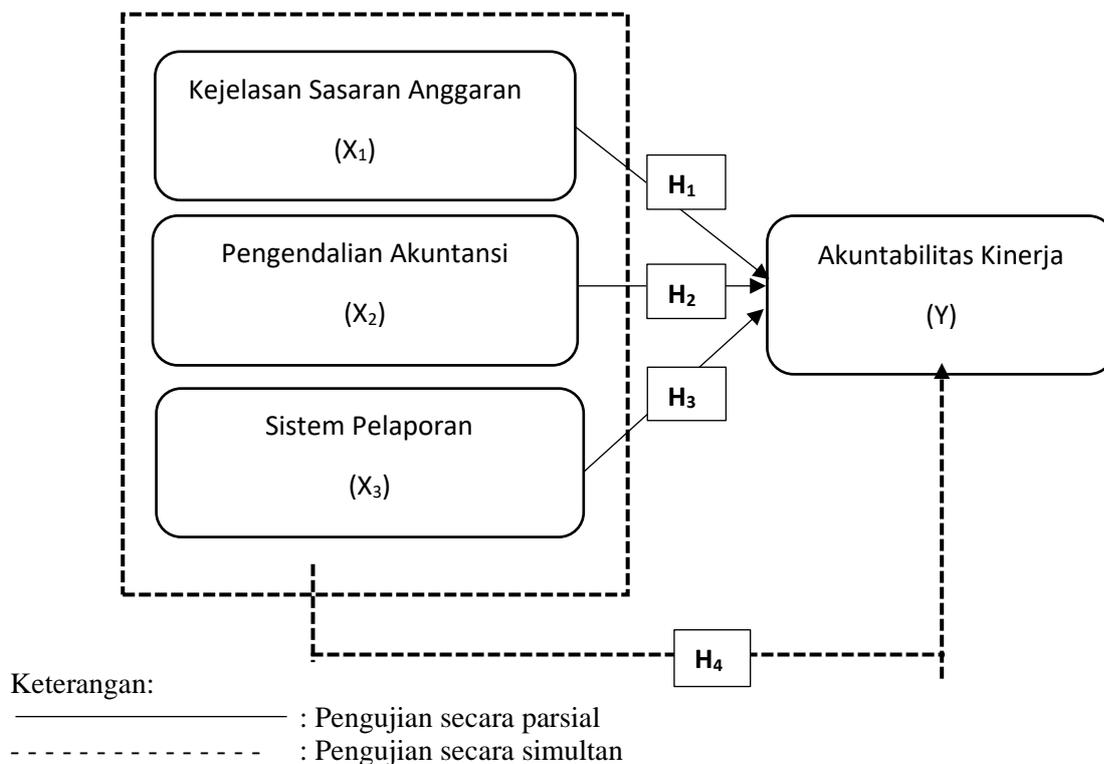
### **Pengendalian Akuntansi**

Menurut Hoesada (2016) dalam (Bernadine & Rosa, 2018), pengendalian akuntansi meliputi pembuatan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan *real time* untuk kegiatan akuntansi, pembuatan sistem penghargaan, peringatan, tuntutan, dan hukuman. Sedangkan menurut Mulyadi (2016), pengendalian akuntansi saat ini telah menjadi salah satu sistem pengendalian internal yang terdiri dari struktur organisasi, cara dan proses koordinasi khusus untuk memelihara kekayaan suatu organisasi serta mengatur dan memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi (Bernadine & Rosa, 2018). Pengendalian akuntansi merupakan seluruh proses dan sistem formal yang memakai informasi dalam memelihara serta mengganti cara organisasi beroperasi (Fauzan et al., 2017).

### Sistem Pelaporan

Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration Reporting* (pelaporan) mengungkapkan bahwa sistem pelaporan ialah kegunaan pengurusan yang berbentuk memberikan hasil pembangunan atau memberi informasi kepada pejabat senior tentang semua perkara yang berkaitan dengan tanggung jawab dan fungsi mereka. Baik dengan lisan dan tertulis, supaya untuk menerima laporan dan mendapat deskripsi tentang bagaimana penerapan pekerjaan individu yang menyampaikan laporan. Selanjutnya, pelaporan yaitu catatan yang menginformasikan mengenai aktivitas tertentu dalam melaporkan kesimpulannya kepada pihak yang terkait atau berhubungan pada aktivitas tertentu (Lestari, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 1**  
**Kerangka Berpikir**  
Sumber : Data diolah, (2021)

### PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja

Kejelasan tujuan anggaran membuat karyawan mendapatkan kinerja yang diharapkan, dengan demikian dapat dilihat bahwa mereka dapat mencapai tujuan anggaran mereka. Kejelasan target anggaran yang berhasil diharapkan dapat memenuhi misi organisasi sehingga untuk mencapai akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat tercapai jika ada pemeriksaan operasional yang efektif. Dalam pemerintahan

daerah, memiliki fungsi pemeriksaan internal pemerintah kabupaten atau kota yang mengendalikan kepala pemerintahan untuk memantau apakah aktivitas yang dilaksanakan oleh pejabatnya berdasarkan visi, misi, tujuan tertentu serta sasaran dan rencana yang ditetapkan. (Lestari, 2019).

H<sub>1</sub> : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

### **Pengendalian Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja**

Menurut teori keagenan, pengendalian akuntansi dibutuhkan oleh banyak pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk manajer (agen) dan karyawan (prinsipal). Manajer (agent) membutuhkan informasi ini merencanakan, memantau dan mengendalikan kegiatan, sedangkan bagi karyawan (principal) informasi ini dapat digunakan untuk melihat prospek pekerjaan mereka dengan perusahaan. Tujuan penggunaan pengendalian akuntansi atas kinerja karyawan menekankan sejauh mana kesalahan dikurangi dalam pemrosesan manual transaksi dengan menginformasikan pelaporan yang tepat dan profesional serta bisa dipakai pemimpin untuk mengambil keputusan (Capah, 2020).

H<sub>2</sub> : Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

### **Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas kinerja berdampak positif terhadap sistem pelaporan, singkatnya sistem pelaporan yang baik dan benar diperlukan untuk mengontrol serta mengawasi kinerja manajer pada kinerja operasional anggarannya. Hal ini menjelaskan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu menulis laporan yang terstruktur dengan baik (Rininda & Sudaryati, 2020).

H<sub>3</sub> : Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

### **Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Anggaran daerah harus dapat menjadi kriteria penerimaan efisiensi kinerja yang diinginkan, oleh karena itu penyusunan anggaran daerah harus dapat mendeskripsikan target kinerja yang relevan. Meskipun anggaran telah dibuat secara komprehensif, detail dan melalui persiapan yang matang, namun seringkali terdapat berbagai kendala atau hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam proses pelaksanaan anggaran. Untuk itu, mengetahui dan mencegah penyimpangan tersebut memerlukan peran pengendalian akuntansi. Semakin baik atau semakin penting sistem pelaporan, semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Wahyuni et al., 2014).

H<sub>4</sub> : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

### **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat asosiatif. Data yang diperoleh berupa data primer yang digunakan berasal dari hasil kuesioner. Populasi penelitian ini adalah 94 responden pegawai di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang yang memenuhi kriteria diantaranya 34 Aparatur Sipil Negara (ASN), 47 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 13 Pegawai Honorer. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini memakai teknik *Purposive Sampling*. Adapun kriteria sampel penelitian yang akan diteliti adalah :

**Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian**

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	31
2.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	32
3.	Pegawai Honorer	13
	<b>Jumlah</b>	76

Sumber : Kepegawaian BPN Kabupaten Rembang, 2021.

Teknik analisis data penelitian ini memakai *Software SmartPLS* versi 3 dengan metode *Partial Least Squares* (PLS). Partial Least Square (PLS) adalah analisis persamaan struktural berbentuk variasi (SEM) yang secara simultan mampu menguji model pengukuran yang biasa dikenal dengan *outer model* maupun model struktural yang biasa disebut dengan *inner model*. Model pengukuran dipakai dalam uji validitas, uji reliabilitas dan uji multikolinearitas. Adapun operasionalisais variabel pada penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 2. Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
<b><u>Independen</u></b> Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan Kinerja</li> <li>2. Sasaran Prioritas</li> <li>3. Jangka Waktu</li> <li>4. Tingkat Kesulitan</li> <li>5. Koordinasi</li> </ol>	Skala Likert
<b><u>Independen</u></b> Pengendalian Akuntansi (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan Pengendalian</li> <li>2. Penilaian Risiko</li> <li>3. Kegiatan Pengendalian</li> <li>4. Informasi dan Komunikasi</li> <li>5. Pemantauan Pengendalian</li> </ol>	Skala Likert
Sistem Pelaporan (X3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan disampaikan tepat waktu</li> <li>2. Relevan</li> <li>3. Konsisten dan akurat</li> <li>4. Informasi tersedia segera ketika diminta</li> <li>5. Kinerja Keuangan</li> <li>6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)</li> </ol>	Skala Likert
<b><u>Dependen</u></b> Akuntabilitas Kinerja (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas Proses</li> <li>2. Akuntabilitas Program</li> <li>3. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum</li> <li>4. Akuntabilitas Kebijakan</li> <li>5. Akuntabilitas Finansial</li> </ol>	Skala Likert

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan menggunakan *SmartPLS 3.0* maka diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	Indikator	Mean	Median	Min	Max	Standar deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran	KSA1	3.934	4.000	3.000	5.000	0.614
	KSA2	4.171	4.000	3.000	5.000	0.523
	KSA3	4.171	4.000	3.000	5.000	0.714
	KSA4	4.118	4.000	2.000	5.000	0.706
	KSA5	4.079	4.000	3.000	5.000	0.684
Pengendalian Akuntansi	PA1	4.289	4.000	3.000	5.000	0.665
	PA2	4.224	4.000	3.000	5.000	0.620
	PA3	4.303	4.000	3.000	5.000	0.585
	PA4	4.355	4.000	3.000	5.000	0.622
	PA5	4.237	4.000	3.000	5.000	0.604
Sistem Pelaporan	SP1	4.289	4.000	3.000	5.000	0.624
	SP2	4.171	4.000	3.000	5.000	0.657
	SP3	4.447	5.000	3.000	5.000	0.657
	SP4	3.789	4.000	2.000	5.000	0.832
	SP5	4.118	4.000	2.000	5.000	0.743
	SP6	4.158	4.000	3.000	5.000	0.708
Akuntabilitas Kinerja	AK1	4.118	4.000	2.000	5.000	0.688
	AK2	4.079	4.000	3.000	5.000	0.580
	AK3	4.342	4.000	3.000	5.000	0.660
	AK4	4.263	4.000	3.000	5.000	0.593
	AK5	4.355	4.000	3.000	5.000	0.601

Sumber : Data diolah dengan SmartPLS (2021)

Terlihat data yang ditunjukkan pada Tabel 3, variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA) menunjukkan bahwa jawaban responden berkisar antara 2 sampai 5 dengan nilai rata-rata antara 3,934 hingga 4,171. Secara keseluruhan, responden setuju bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran harus diterapkan dengan jelas selama penyusunan anggaran. Memiliki sasaran anggaran yang spesifik dapat menggampangkan pengguna dalam menetapkan tujuan anggaran. Selain itu, sasaran anggaran yang dirancang akan konsisten dengan hasil yang akan diraih organisasi.

Variabel Pengendalian Akuntansi (AK) menunjukkan bahwa tingkat jawaban responden berkisar antara 3 sampai 5 dengan nilai rata-rata antara 4,224 hingga 4,355. Secara keseluruhan, responden setuju bahwa Pengendalian Akuntansi harus diterapkan pada semua instansi pemerintah. Variabel Pengendalian Akuntansi (AK) menunjukkan bahwa tingkat jawaban responden berkisar antara 3 sampai 5 dengan nilai rata-rata antara 4,224 hingga 4,355. Secara keseluruhan, responden setuju bahwa Pengendalian Akuntansi harus diterapkan pada semua instansi pemerintah. Pengendalian akuntansi termasuk struktur organisasi dan semua metode serta alat terkoordinasi yang dipakai dalam perusahaan bertujuan menjaga aset perusahaan, memverifikasi ketepatan dan keakuratan data akuntansi,

meningkatkan efektivitas fungsional, dan membantu mematuhi kebijakan manajemen yang sudah ditentukan.

Variabel Sistem Pelaporan (SP) menunjukkan bahwa jawaban responden berkisar antara 2 sampai 5 dengan nilai rata-rata antara 3,789 hingga 4,447. Secara keseluruhan, responden setuju bahwa sistem pelaporan harus disajikan menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan peraturan lainnya dengan tujuan untuk menunjukkan kepada entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam suatu instansi atau organisasi dalam penyusunan laporan keuangan serta mengembangkan perbandingan laporan keuangan antar periode dan antar entitas pelaporan serta menjadi petunjuk saat penerapan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah.

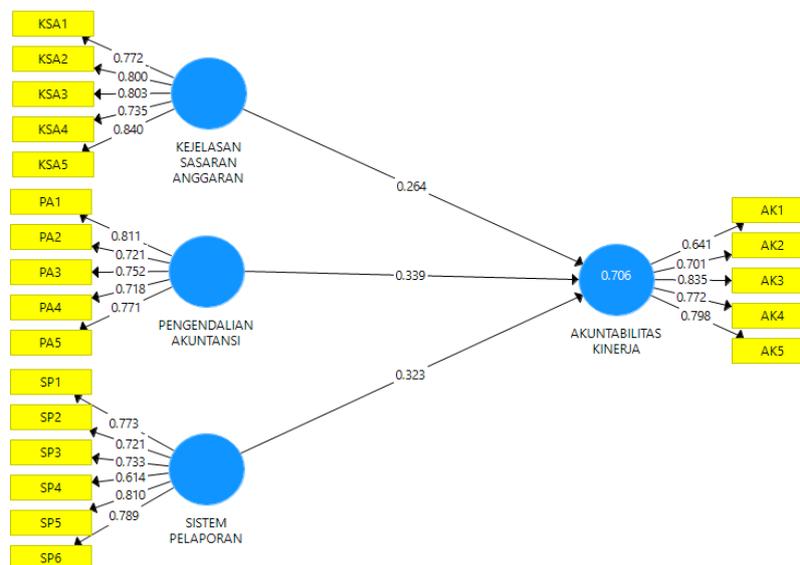
Variabel Akuntabilitas Kinerja (AK) menjelaskan bahwa jawaban responden berkisar antara 2 sampai 5 dengan nilai rata-rata antara 4,079 hingga 4,355. Secara keseluruhan, responden setuju bahwa akuntabilitas kinerja digunakan untuk mewujudkan konsep manajemen pemerintahan yang akuntabel dan *good governance* seperti, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), jelas, efektif dan efisien.

### Hasil Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran (*Outer Model*) yang biasa dikenal sebagai *outer relation* atau *measurment model* adalah model yang mengukur hubungan antara setiap blok indikator berpengaruh dengan variabel latennya.

### Uji *Convergent Validity*

Hasil nilai *convergent validity* model pengukuran dengan indeks refleksi. Jika korelasi pengukuran refleksi individual dengan konstruk yang diukur lebih besar dari 0,70 itu dianggap tinggi. Tetapi, berdasarkan penelitian Chin (1998) dalam Ghozali (2015) pada awal peningkatan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 sampai 0,6 dikatakan cukup memenuhi. Pada penelitian ini dapat menggunakan batas *loading faktor* sebesar 0,50 seperti terlihat dalam Gambar 1 dibawah ini :



**Gambar 2.**  
**Model Pengukuran (*Outer Model*)**  
Sumber : data diolah dengan SmartPLS (2021)

Hasil dari olah data memakai SmartPLS versi 3 ditunjukkan dalam Gambar 2. diatas nampak bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran diuraikan dengan 5 indikator diantaranya KSA1 dengan nilai *loading factor* (0,772), KSA2 dengan nilai *loading factor* (0,800), KSA3 dengan nilai *loading factor* (0,803), KSA4 dengan nilai *loading factor* (0,735) dan KSA5 dengan nilai *loading factor* (0,840), dimana semua indikator variabel Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai nilai *loading factor* > 0,50 dan ditunjukkan dengan nilai *outer model* atau korelasi dalam variabel secara menyeluruh telah mencukupi validitas konvergen. Artinya, konstruk tersebut memiliki *convergent validity* yang baik.

Hasil dari olah data menggunakan SmartPLS versi 3 ditunjukkan dalam Gambar 2 diatas nampak bahwa variabel Pengendalian Akuntansi diuraikan dengan 5 indikator diantaranya PA1 dengan nilai *loading factor* (0,811), PA2 dengan nilai *loading factor* (0,721), PA3 dengan nilai *loading factor* (0,752), PA4 dengan nilai *loading factor* (0,718) dan PA5 dengan nilai *loading factor* (0,771), dimana semua indikator variabel Pengendalian Akuntansi mempunyai nilai *loading factor* > 0,50 dan ditunjukkan dengan nilai *outer model* atau korelasi dalam variabel secara menyeluruh telah mencukupi validitas konvergen. Artinya, konstruk tersebut memiliki *convergent validity* yang baik.

Hasil dari olah data menggunakan SmartPLS versi 3 ditunjukkan dalam Gambar 2 diatas nampak bahwa variabel Sistem Pelaporan diuraikan dengan 6 indikator diantaranya SP1 dengan nilai *loading factor* (0,773), SP2 dengan nilai *loading factor* (0,721), SP3 dengan nilai *loading factor* (0,733), SP4 dengan nilai *loading factor* (0,614), SP5 dengan nilai *loading factor* (0,810), dan SP6 dengan nilai *loading factor* (0,789), dimana semua indikator variabel Sistem Pelaporan mempunyai nilai *loading factor* > 0,50 dan ditunjukkan dengan nilai *outer model* atau korelasi dalam variabel secara menyeluruh telah mencukupi validitas konvergen. Artinya, konstruk tersebut memiliki *convergent validity* yang baik.

Hasil dari olah data menggunakan SmartPLS versi 3 ditunjukkan dalam Gambar 2 diatas nampak bahwa Akuntabilitas Kinerja diuraikan dengan 5 indikator diantaranya AK1 dengan nilai *loading factor* (0,641), AK2 dengan nilai *loading factor* (0,701), AK3 dengan nilai *loading factor* (0,835), AK4 dengan nilai *loading factor* (0,772), dan AK5 dengan nilai *loading factor* (0,798), dimana semua indikator variabel Akuntabilitas Kinerja mempunyai nilai *loading factor* > 0,50 dan ditunjukkan dengan nilai *outer model* atau korelasi dalam variabel secara menyeluruh telah mencukupi validitas konvergen. Artinya, konstruk tersebut memiliki *convergent validity* yang baik.

### Uji Discriminant Validity

Berikut ini pengujian diskriminant validity model tersebut menunjukkan nilai validitas diskriminan yang baik. Hasil uji validitas diskriminan ditunjukkan pada Tabel 4 dibawah ini :

**Tabel 4. Nilai Cross Loading**

	AKUNTABILITAS KINERJA	KEJELASAN SASARAN ANGGARAN	PENGENDALIAN AKUNTANSI	SISTEM PELAPORAN
AK1	0,641	0,563	0,475	0,470
AK2	0,701	0,578	0,620	0,568
AK3	0,835	0,534	0,641	0,637
AK4	0,772	0,474	0,626	0,624
AK5	0,798	0,520	0,562	0,649
KSA1	0,451	0,772	0,532	0,511

KSA2	0,476	0,800	0,392	0,491
KSA3	0,584	0,803	0,633	0,608
KSA4	0,557	0,735	0,485	0,487
KSA5	0,677	0,840	0,524	0,598
PA1	0,705	0,511	0,811	0,679
PA2	0,552	0,564	0,721	0,615
PA3	0,518	0,482	0,752	0,570
PA4	0,528	0,431	0,718	0,566
PA5	0,618	0,481	0,771	0,712
SP1	0,516	0,498	0,625	0,773
SP2	0,544	0,517	0,647	0,721
SP3	0,626	0,469	0,604	0,733
SP4	0,507	0,521	0,502	0,614
SP5	0,669	0,484	0,699	0,810
SP6	0,621	0,581	0,635	0,789

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)

Berdasarkan pada seluruh indikator dalam suatu variabel laten mempunyai nilai *cross loading* yang lebih tinggi pada konstraknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya menjadi syarat untuk memenuhi nilai *discriminant validity*. Salah satunya pada konstruk Y, dimana nilai *loading*nya adalah 0,641 lebih besar dibandingkan dengan *cross loading* ke konstruk lainnya, yaitu 0,563 ke X<sub>1</sub>, 0,475 ke X<sub>2</sub>, dan 0,470 ke X<sub>3</sub>. Artinya, setiap variabel laten mempunyai nilai *discriminant validity* yang baik sehingga semua indikatornya adalah valid. Nilai *discriminant validity* yang tinggi digunakan untuk menjelaskan suatu konstruk adalah unik dan dapat menunjukkan fenomena yang diteliti.

#### Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) untuk setiap konstruk yang nilainya harus > dari 0,5, Ghazali (2014: 40). Berikut ini hasil penelitian mengenai Average Variance Extrated sebagai berikut :

Tabel 5. Average Variance Extracted (AVE)

Keterangan	AVE	$\sqrt{AVE}$	Keterangan
AKUNTABILITAS KINERJA	0,567	0,753	VALID
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN	0,625	0,791	VALID
PENGENDALIAN AKUNTANSI	0,571	0,755	VALID
SISTEM PELAPORAN	0,552	0,743	VALID

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)

Dari tabel diatas dapat ditunjukkan nilai dari AVE dan untuk konstruk Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Akuntabilitas Kinerja. Diketahui setiap konstruk mempunyai nilai validitas yang baik pada setiap indikator atau kuesioner yang dipakai agar membuktikan kebenaran hubungan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sesuai dengan nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* untuk membuktikan apakah kuesioner penelitian yang dipakai reliabel dan dapat dipercaya. Jika nilai *cronbach's alpha* > 0,7 menjelaskan bahwa kuesioner penelitian reliabel (Ghozali, 2015). Pada saat yang sama, batas *composite reliability* > dari 0,7 (Ghozali, 2015). Uji reliabilitas penelitian ini ditemukan hasil yang ditunjukkan dalam Tabel 6 dibawah ini :

**Tabel 6. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability**

	Cronbach's Alpha	Reliabilitas Komposit
AKUNTABILITAS KINERJA	0,806	0,866
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN	0,851	0,893
PENGENDALIAN AKUNTANSI	0,812	0,869
SISTEM PELAPORAN	0,835	0,880

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)

Hasil uji SmartPLS mengatakan bahwa jika nilai *cronbach's alpha* > 0,80 mempunyai skala baik, > 0,70 mempunyai skala yang diterima, dan > 0,60 dianggap berskala eksploratif ini termasuk estimasi rendah. Menurut Tabel 6 diatas bisa dilihat nilai *cronbach's alpha* dalam setiap konstruk > dari 0,70 atau diatas 0,80. Nilai *cronbach's alpha* yang paling tinggi ditunjukkan oleh konstruk kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,851 dan nilai *cronbach's alpha* yang paling rendah ditunjukkan oleh konstruk akuntabilitas kinerja sebesar 0,806. Artinya, semua indikator konstruk adalah mencukupi uji reliabilitas *cronbach's alpha* dengan skala baik karena tidak ada nilai yang kurang dari 0,70.

Sesuai Tabel 4.7 di atas diketahui nilai *composite reliability* setiap konstruk > dari 0,70 atau diatas 0,80. Nilai *composite reliability* tertinggi yang ditunjukkan oleh konstruk kejelasan sasaran anggaran adalah 0,893. Sedangkan nilai *composite reliability* terendah ditunjukkan oleh konstruk pengendalian akuntansi. Artinya semua indikator konstruk reliabel atau mencukupi uji reliabilitas. Dapat juga dilihat nilai *composite reliability* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *cronbach's alpha*.

### Uji Multikolinearitas

*Outer model* adalah uji multikolinearitas yang dipakai dalam menganalisis apakah terdapat korelasi antara variabel independen pada sebuah model. Dalam menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas suatu model, hal ini bisa diketahui melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) harus < 5, karena adanya kolinearitas antar konstruk ditunjukkan apabila VIF > 5. Outputnya ditunjukkan pada Tabel 7 berikut ini :

**Tabel 7. Nilai VIF**

KETERANGAN	AKUNTABILITAS KINERJA
AKUNTABILITAS KINERJA	
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN	1,970
PENGENDALIAN AKUNTANSI	3,465
SISTEM PELAPORAN	3,763

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)

Menurut Tabel 7 diatas, tidak ada nilai VIF > 5 sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas. Seperti dijelaskan di atas, salah satu perkiraan regresi linier klasik adalah tidak terdapat multikolinearitas sempurna (*no perfect multicollinearity*). Model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antara variabel X.

### Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

*Inner model* adalah model struktural yang dipakai dalam mengindikasi pengaruh kausalitas (pengaruh sebab-akibat) antar variabel laten atau variabel yang tidak bisa dinilai secara langsung. Model struktural (*inner model*) mendeskripsikan pengaruh kausalitas antar variabel laten yang berhasil diuji sesuai dengan isi teori. Dalam uji model struktural (*inner model*) digunakan bantuan prosedur *Bootsrapping* dan *Blindfolding* software SmartPLS.

### *Path Coefficients* atau Koefisien Jalur

Hasil pengolahan data SmartPLS, nilai *direct effect* ini biasa disebut dengan koefisien jalur. Untuk menguji signifikan dan kekuatan pengaruh antar kosntruk serta untuk menguji hipotesis dapat dilakukan pengukuran *path coefficient*. Berikut ini hasil penelitian *Path Coefisients* sebagai berikut :

Tabel 8. *Path Coefficient*

KETERANGAN	AKUNTABILITAS KINERJA
AKUNTABILITAS KINERJA	
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN	0,264
PENGENDALIAN AKUNTANSI	0,339
SISTEM PELAPORAN	0,323

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)

Berdasarkan hasil analisis *direct effects inner model* pada Tabel 8 di diambil ringkasan seperti dibawah ini :

- Pengaruh langsung Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_1$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) sebesar (0,264), jika Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_1$ ) meningkat satu satuan unit maka Akuntabilitas Kinerja (Y) akan meningkat sebesar 26,4%. Artinya pengaruh ini bersifat positif.
- Pengaruh langsung Pengendalian Akuntansi ( $X_2$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) sebesar (0,339), jika Pengendalian Akuntansi ( $X_2$ ) meningkat satu satuan unit maka Akuntabilitas Kinerja (Y) akan meningkat sebesar 33,9%. Artinya pengaruh ini bersikap positif.
- Pengaruh langsung Sistem Pelaporan ( $X_3$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) sebesar (0,323), jika Sistem Pelaporan ( $X_3$ ) meningkat satu satuan unit maka Akuntabilitas Kinerja (Y) akan meningkat sebesar 32,3%. Artinya pengaruh ini bersikap positif.

Dari penjelasan di atas, apabila koefisien jalur bernilai positif, maka hubungan suatu variabel terhadap adalah searah, apabila nilai suatu variabel eksogen meningkat/naik, maka nilai variabel endogen juga meningkat/naik. Sebaliknya apabila koefisien jalur bernilai negatif, maka hubungan suatu variabel terhadap adalah berlawanan arah, jika nilai suatu variabel eksogen meningkat/naik, maka nilai variabel endogen menurun.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau *R-Square* dipakai untuk memeriksa ketepatan dugaan suatu model, berikut ini hasil output Determinana ( $R^2$ ) sebagai berikut :

**Tabel 9. Koefisien Determinan (R-Square)**

	R Square	Adjusted R Square
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	0,706	0,694

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)

Tabel 9 dapat diketahui nilai (*R-Square*) variabel Akuntabilitas Kinerja adalah 0,706 yang berarti 70,6% akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan sedangkan sisanya sebesar 29,4% dapat dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini. Berdasarkan nilai *R-Square* diatas, artinya model dalam penelitian termasuk golongan moderate (sedang) dalam menunjukkan pengaruh antar variabel. Semakin tinggi nilai (*R-Square*), semakin baik variabel independen mampu menguraikan variabel dependen, maka persamaan struktural semakin baik.

### *Predictive relevance* ( $Q^2$ )

*Predictive relevance* adalah uji yang digunakan dalam menunjukkan seberapa baik nilai penelitian yang diperoleh dari model dan juga pertimbangan pengukurannya memakai prosedur *blindfolding* dengan melihat pada nilai *Q-Square*. Nilai *Q-Square* > 0 menjelaskan model mempunyai *predictive relevance* dan nilai observasi yang baik, sedangkan nilai *Q-Square* < 0 menjelaskan model kurang mempunyai *predictive relevance* dan nilai observasi tidak baik.

**Tabel 10. Nilai Q-Square**

KETERANGAN	SSO	SSE	$Q^2 (=1 - SSE/SSO)$	Keterangan
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	380,000	235,930	0,379	Memiliki nilai <i>predective relevance</i>

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)

Menurut data yang diolah pada Tabel 4.10 diketahui nilai *Q-Square* variabel dependen (endogen) sebesar 0,379 atau 37,9%. Artinya, penelitian ini memiliki *goodness of fit* yang baik karena nilai *Q-Square* > 0 (nol), dengan demikian model dalam penelitian ini mempunyai nilai prediktif yang relevan.

### *Effect Size* ( $f^2$ )

*F-Square* adalah ukuran yang dipakai dalam mengevaluasi pengaruh pasti suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Perubahan nilai *F-Square* ketika variabel eksogen tertentu dihapuskan dari model dan dipakai dalam menilai apakah variabel yang dihapus mempunyai pengaruh yang substantive pada konstruk endogen.

Kriterianya adalah jika nilai ( $f^2$ ) = 0,02 menunjukkan pengaruh yang kecil dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, jika ( $f^2$ ) = 0,15 menunjukkan pengaruh yang sedang dari variabel eksogen

terhadap variabel endogen dan jika ( $f^2$ ) = 0,35 menunjukkan pengaruh yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.

**Tabel 11. F-Square**

KETERANGAN	AKUNTABILITAS KINERJA
AKUNTABILITAS KINERJA	
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN	0,121
PENGENDALIAN AKUNTANSI	0,113
SISTEM PELAPORAN	0,094

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)

Hasil olah data ditunjukkan pada Tabel 4.11 dilihat bahwa pengaruh *f-square* variabel eksogen X1 terhadap Y sebesar 0,121. Maka dampak dari variabel X1 terhadap Y adalah sedang. Variabel X2 terhadap Y sebesar 0,113. Ini mengindikasikan dampak yang sedang dari variabel X2 terhadap Y. Nilai *f-square* variabel X3 terhadap variabel Y sebesar 0,094. Ini dampak yang sedang dari variabel X3 terhadap Y.

#### **Goodness of Fit (GoF)**

Hasil uji GoF yang dimiliki dengan mengalikan nilai akar rata-rata communalities dengan nilai akar rata-rata *R-Square* ditunjukkan pada Tabel 4.5 dan 4.9. Dari hasil perhitungan GoF berikut didapatkan nilai 0,638 sehingga bisa diambil ringkasan bahwa model mempunyai GoF yang besar dan semakin besar nilai GoF maka semakin baik deskripsi sampel penelitian. Rumus untuk menghitung nilai GoF seperti dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{GoF} &= \sqrt{\text{AVE} \times R^2} \\ \text{GoF} &= \sqrt{0,578 \times 0,706} \\ \text{GoF} &= \sqrt{0,408} \\ \text{GoF} &= 0,638 \end{aligned}$$

Semakin besar nilai GoF semakin sesuai deskripsi model. Nilai GoF terbagi dalam tiga kategori, yaitu 0,1 (lemah), 0,25 (sedang), dan 0,36 (besar). Nilai GoF sebesar 0,638 diartikan sebagai GoF yang besar, artinya model pengukuran (*outer model*) dengan model struktural (*inner model*) adalah valid.

**Tabel 12. R-Square**

Keterangan	R Square
AKUNTABILITAS KINERJA	0,706

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)

**Tabel 13. Communalities**

KETERANGAN	AVE
AKUNTABILITAS KINERJA	0,567
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN	0,625

<b>PENGENDALIAN AKUNTANSI</b>	0,571
<b>SISTEM PELAPORAN</b>	0,552

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (202)

### Uji Hipotesis (*Resampling Bootstrapping*)

#### Uji t (Parsial)

Pengujian hipotesis dilakukan melalui proses *bootstrapping* menggunakan SmartPLS. Jika *t-statistics* > 1,96 dan signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05 atau 5%, maka uji hipotesis dapat diterima. Jika *P values* > 0,05, maka uji hipotesis diterima dengan menggunakan probabilitas. Hasil dari proses *bootstrapping* memakai SmartPLS dijelaskan dalam Tabel 4.14 sebagai berikut :

**Tabel 14. Hasil Uji t Hipotesis**

Keterangan	Sampel Asli (O)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (  O/STDEV  )	P Values	Keterangan
<b>KEJELASAN SASARAN ANGGARAN -&gt; AKUNTABILITAS KINERJA</b>	0,264	0,113	2,346	0,019	Diterima
<b>PENGENDALIAN AKUNTANSI -&gt; AKUNTABILITAS KINERJA</b>	0,339	0,140	2,425	0,016	Diterima
<b>SISTEM PELAPORAN -&gt; AKUNTABILITAS KINERJA</b>	0,323	0,125	2,579	0,010	Diterima

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)

Hasil olah data di atas dapat dipakai oleh peneliti dalam menilai dukungan hipotesis. Tabel di atas memiliki kolom sampel asli (*Original Sample*) yaitu skor beta unstandardize yang dipakai dalam memastikan sifat perkiraan variabel independen untuk variabel dependen positif atau negatif. Standar deviasi didefinisikan sebagai standar error/kesalahan standar. Disisi lain, nilai t-statistik dan p-value adalah pengukuran penting dari hasil perkiraan antara variabel laten yang dianalisis, tergantung pada jenis hipotesis.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Bahwa jika output diterima karena hasil uji-t menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja. Hal ini dapat dilihat dari estimasi sampel asli (*original sample*) sebesar 0,264 menyatakan pengaruh searah yang positif. Secara parsial Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja berdasarkan nilai probabilitas yang signifikan yaitu *t-statistic* 2,346 > *t-tabel* (1,96) dan *p-value* 0,019 < 0,005. Hasil ini membuktikan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kinerja pemerintah akan semakin meningkat jika implementasi target anggaran dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai berdasarkan teori yang diuraikan oleh Kenis bahwa kejelasan sasaran anggaran menunjukkan seberapa jelas dan tepat sasaran anggaran ditetapkan sehingga dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilan sasaran anggaran tersebut. Maka, target anggaran pemerintah daerah perlu disajikan secara jelas dan tepat agar staff memahami tujuan anggaran yang ingin dicapai oleh anggaran tersebut, mengerti bagaimana cara akan mencapainya dengan memakai sumber daya yang tersedia, membantu pegawai memperoleh kinerja yang diinginkan dan akan lebih mudah dalam menghitung kesuksesan atau kesalahan dalam mencapai misi organisasi.

Dari hasil olah data yang didapat, bahwa indikator kejelasan sasaran anggaran yang menonjol adalah indikator “sasaran prioritas” dengan pernyataan “anggaran yang dibuat telah mempertimbangkan skala prioritas”, yang menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pegawai telah menentukan prioritas program dan menyusun anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan. Dan indikator “jangka waktu” dengan pernyataan “anggaran yang dibuat telah ditetapkan jangka waktu yang dibutuhkan dalam waktu pengerjaan”, yang menunjukkan bahwa pegawai dapat menentukan jangka waktu dia berapa lama waktu yang diperlukan dalam melakukan pekerjaannya agar cepat selesai tepat waktu berdasarkan perjanjian kerja. Sedangkan indikator kejelasan sasaran anggaran yang paling tidak dominan adalah “tujuan kinerja” dengan pernyataan “Tujuan Rencana dan Anggaran (RKA) secara umum cukup jelas dan tidak membingungkan”, yang menunjukkan bahwa dalam proses melaksanakan tugasnya, pegawai tidak mengerti bagaimana meningkatkan kinerja yang maksimal karena mereka merasa bahwa kinerja mereka akan diukur.

### **Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Hipotesis kedua ( $H_{a2}$ ) diterima karena hasil uji-t menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara pengendalian akuntansi dengan akuntabilitas kinerja. Hal ini dapat dilihat dari estimasi sampel asli (*original sample*) sebesar 0,339 menyatakan pengaruh searah yang positif. Secara parsial Pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja berdasarkan nilai probabilitas yang signifikan yaitu  $t\text{-statistic } 2,425 > t\text{-tabel } (1,96)$  dan  $p\text{-value } 0,016 < 0,005$ . Hasil ini membuktikan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja. Ini berarti bahwa Pengendalian Akuntansi konsisten dan sistematis meningkatkan kepercayaan antara *stake holder* dan publik. Selain itu, penerapan pengendalian akuntansi dapat menghindari aktivitas yang tidak berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan menghindari kerugian bagi organisasi. Melalui penerapan pengendalian akuntansi yang tepat, akan tercipta *good governance* untuk mengembangkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari hasil olah data yang didapat, bahwa indikator pengendalian akuntansi yang menonjol adalah indikator “informasi dan komunikasi” dengan pernyataan “setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan informasi dan komunikasi mengenai bukti transaksi yang benar dan sah”, hal ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pegawai dapat menyajikan laporan keuangan yang telah disusun menginformasikan tentang setiap transaksi, yang kemudian dibuktikan oleh bukti transaksi yang kuat, sehingga tidak ada proses transaksi tanpa bukti yang jelas yang dapat mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap praktik akuntansi.

### **Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Hipotesis ketiga ( $H_{a3}$ ) diterima karena hasil uji-t menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara pengendalian akuntansi dengan akuntabilitas kinerja. Hal ini dapat dilihat dari estimasi sampel

asli (*original sample*) sebesar 0,323 menyatakan pengaruh searah yang positif. Secara parsial Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja berdasarkan nilai probabilitas yang signifikan yaitu  $t\text{-statistic } 2,579 > t\text{-tabel } (1,96)$  dan  $p\text{-value } 0,010 < 0,005$ . Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pelaporan berkualitas tinggi atau baik dapat menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas atau petanggungjawaban atas laporan keuangan yang disusun. Apabila laporan keuangan bisa diaudit dan hasil auditnya berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum (SAK), maka laporan keuangan tersebut akan dipertahankan. Kualitas laporan keuangan yang bisa diaudit mampu mengembangkan kejujuran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil olah data yang didapat, bahwa indikator sistem pelaporan yang menonjol adalah indikator “konsisten dan akurat” dengan pernyataan “laporan keuangan yang disajikan secara konsisten dan akurat”, yang menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pegawai mampu menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang valid dan akurat dengan menerapkan prinsip dasar akuntansi dengan benar, terstruktur dalam suatu proses untuk menciptakan kepatuhan di antara pengguna akuntansi dengan baik. Sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dan memenuhi kebutuhan para pengguna informasi tersebut.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Hasil penelitian uji  $f$  menunjukkan bahwa nilai  $f$  hitung  $> f$  tabel memiliki nilai sebesar  $42,62 > 2,73$ , maka hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan) memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hasil ini menunjukkan bahwa memiliki tujuan anggaran yang jelas akan membantu para karyawan mencapai kinerja yang diharapkan. Pengendalian akuntansi dapat membantu pemerintah dalam menyusun keputusan yang tepat, mengendalikan operasional secara lebih efektif untuk meningkatkan kinerja yang maksimal. Sistem pelaporan yang benar digunakan untuk mengawasi dan mengontrol akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan anggaran yang sudah ditentukan.

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN**

Simpulan penelitian ini ialah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan memberikan kontribusi pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 70,6%. Secara parsial dan simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Implikasi penelitian ini menyatakan bahwa kedepannya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rembang harus meningkatkan akurasi target anggaran dan efisiensi penerapan pengendalian akuntansi. Selain itu, sistem pelaporan juga perlu ditingkatkan agar akuntabilitas kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemerintah Rembang lebih baik di waktu mendatang. Berharap penelitian ini bisa digunakan dalam pengembangan wawasan bagi akademisi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Para peneliti yang melakukan penelitian pada subjek yang sama berharap dapat memperbanyak sampel hasil pengolahan data kuesioner dan menegaskan kembali objek penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal.

Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu : 1) Hasil penelitian menjelaskan bahwa nilai  $R\text{-Square}$  yang terbilang sedang (*moderate*) atau lemah. Oleh karena itu, masih terdapat variabel independen lainnya yang menunjukkan hubungan akuntabilitas kinerja, 2) Pada penelitian ini responden yang dipakai hanya

pegawai yang berada pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang sehingga kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan, 3) Peneliti hanya mencerminkan kondisi yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang, sehingga hasil penelitian hanya mencerminkan kondisi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang, 4) Metode pengumpulan data yang dipakai adalah data survei berbentuk kuesioner, sehingga terdapat perbedaan persepsi tentang maksud dan tujuan pernyataan berdasarkan tanggapan atau persepsi responden.

Saran yang diberikan peneliti, yaitu : 1) Penelitian ini hanya menggunakan 76 responden dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang sebagai sampel. Dalam penelitian selanjutnya, diharapkan untuk meningkatkan jumlah sampel guna menunjukkan reliabilitas hasil penelitian. Semakin banyak sampel, semakin dapat diandalkan hasilnya, 2) Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel independen/eksogen tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap akuntabilitas kinerja, artinya masih ada variabel lainnya di luar model, sehingga dalam penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambahkan variabel lain ke dalam model, misalnya motivasi, komitmen dan kualitas sumber daya manusia, 3) Saran untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja harus memperhatikan kejelasan sasaran anggaran. Diketahui dari lemahnya dampak kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja, karena penanggung jawab penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran yang direncanakan memberikan informasi yang relevan, spesifik dan mudah dipahami untuk mencapai akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaannya.

## REFERENSI

- Alfianika, N. (2018). *Buku ajar metode penelitian pengajaran bahasa Indonesia*. Deepublish. Achmad Suharyo, Sukismanto Aji, C. D. (2021). Akuntabilitas Publik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Pemerintah Provinsi Lampung. *E-JKPP*, 7(1), 1–7.
- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(2), 105–117. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3>
- Ali Zakiyudin, M., & Suyanto, S. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(01), 89–96. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i01.99>
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454>
- Bernadine, & Rosa. (2018). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. *Thesis (S1) UAJY*, 9–35.
- Budiani, L. V., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2), 1–20. <https://doi.org/10.52103/tatakelola.v7i1.69>
- Cahyani, N. M. M., & Utama, I. M. K. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas*

- Udayana, 10(ISSN: 2302-8556), 825–840.
- Capah, A. S. (2020). Penaruh Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi , Pengendalian Internal dan Motivasi Kerja ( Studi Pada Perusahaan Jasa di Kabupaten Subang ). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(06), 1–14.
- Dewi, G. A. K. R. S. (2016). Pengaruh Moralitas Indiiividu Dan Pengendalian Internal Pada Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 77–92. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i1.9984>
- Eni Kaharti. (2019). Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran dan Penetapan Anggaran. *Jrunal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 1–6.
- Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Prov. JOM Fekon, 4(1), 670–685.
- Fathiyah. (2019). Optimalisasi Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Mencegah Terjadinya Penyelewengan Kas dan Aset pada Lembaga Pendidikan Non Pemerintah (Swasta). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(1), 163–169. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.84>
- Fauzan, R. H., Nasir, A., & Silalahi, S. P. (2017). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provin. Riau University.*
- Haslindah, Kamase, J., & Hajering. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD di Kabupaten Sindenreng Rappang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(September), 92–123.
- Irawati, A., & Agesta, C. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–70.
- Isnanto, Y., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15.
- Khumaidah, N. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang. *Doctoral Dissercation.*
- Lestari, R. D. (2019). Analisis Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik ( Studi Empiris Pada OPD di Kabupaten Temanggung ). *Skripsi.*
- Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 192–199. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.116>
- Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & Agustawan. (2021). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(2), 214–223.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(4), 33–43. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2136>
- Paramitha, I. A. M. D., & Gayatri. (2016). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi*

- Uni*, 16(3), 2457–2479.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444.
- Preclina, D. D., & Wuryani, E. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 7(3), 1–10.
- Purnomo, R. A. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS. In *Cv. Wade Group*.
- Putri, P. E. M. R. (2018). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Rawat Inap Pada RSNU Jombang. *STIE PGRI DEWANTARA*, 6–25.
- Rininda, B. P., & Sudaryati, E. (2020). Pengaruh Ketepatan Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kerja. *E-JA e-Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556*, 30(5), 1099–1114.
- Setyawan, H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 251–264.
- Siregar, A. (2015). Akuntabilitas Kinerja Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Medan. *Artikel Ilmiah*, 10–55.
- Susilana, R. (2015). *Modul 6 Populasi Dan Sampel: Modul Praktikum*.
- Wahid, I. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Dae. *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 2457–2471.
- Wahyuni, Surya, R. A. S., & Savitri, E. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Onlne Mahasiswa Universitas Riau*, 32, 1–15.
- Widaninggar, R. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Rembang. *Doctoral Dissercation*.
- Widia, & Verawaty. (2017). Pengaruh Faktor Kejelasan Sasaran Anggaran, Faktor Akuntansi, dan Faktor Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Article*, 158–166.
- Yandrian. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, kapasitas Individu, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Senjangan Anggaran. *Artikel Ilmiah*, 1–19.
- Yulianto, A. R., & Muthaheer, O. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(2), 204. <https://doi.org/10.35448/jte.v14i2.6478>
- Yunistiyani, V., & Tahar, A. (2016). Analisis Hubungan Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Zawawi, M. (2016). Model Akuntabilitas Kinerja Skpd Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 1(1), 8–13.

- <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/693/844>
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi (JRAK)*, 7(1), 11–21.  
([www.atrbpn.go.id](http://www.atrbpn.go.id)). "Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional". Diakses Sabtu, 11/12/2021
- (<https://bpkad.banjar.go.id/index.php/2017/09/07/kejelasan-sasaran-anggaran/>). "Kejelasan Sasaran Anggaran". Diakses Kamis, 07/09/2017
- (<https://selinsetiana.wordpress.com/2015/11/03/sistem-pelaporan-keuangan-dan-sistem-pelaporan-manajemen>). "Sistem Pelaporan Keuangan dan Sistem Pelaporan Manajemen". Diakses Selasa, 03/11/2015
- (<https://kumparan.com/berita-hari-ini/kerangka-berpikir-pengertian-cara-membuat-dan-contohnya-1vs3Xt48y6k>). "Kerangka Berpikir : Pengertian, Cara Membuat, dan Contohnya". Diakses Kamis, 03/06/2021 18:23
- (<https://www.republika.co.id/berita/qao5f8399/selama-pandemi-bpk-jateng-serahkan-lhplkpd-30-daerah>). "Selama Pandemi, BPK Jateng Serahkan LHP-LKPD 30 Daerah". Diakses Kamis, 21/05/2020 1